

## DESENTRALISASI FISKAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROPINSI YOGYAKARTA

**Dwi Suciayu, Fahmi Wibawa**

Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia

dwi.suciayu@gmail.com, fahmiwb@ymail.com

### **Abstract**

*Purpose of this study is to analyze the effect of fiscal decentralization to economic growth in The Special Region of Yogyakarta Province. The Explanatory variables is local district government's budget in terms of acceptance of revenue, revenue-sharing, the general allocation fund, and special allocation funds to economic growth in the province. The result show fiscal decentralization contributes effect to economic growth. Yet, Each variable point out that foreign-source revenue significant to influence economic growth, revenue-sharing significant effect on economic growth, the general allocation fund a significant effect on economic growth, the special allocation fund doesn't give significant effect on economic growth. This means the implementation of fiscal decentralization has positive influence on economic growth. Thus, the central government may continue in implement fiscal decentralization in a special area of Yogyakarta since the policy could promote economic growth in the region.*

**Keywords:** *economic growth; revenue; general allocation funds; special allocation fund*

### **Abstrak**

*Tujuan dari penelitian ialah untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Variabel penjelas ialah anggaran pendapatan dan belanja daerah terdiri atas pendapatan, pendapatan bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Hasil yang ada menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal secara bersama-sama memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara individu, pendapatan, pendapatan bagi hasil, dan dana alokasi umum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan dana alokasi khusus tidak memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi desentralisasi fiskal memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya, pemerintah pusat dapat melanjutkan implementasi ini, karena kebijakan ini mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah.*

**Kata Kunci:** *pertumbuhan ekonomi; pendapatan; dana alokasi umum; dana alokasi khusus*

## **PENDAHULUAN**

Dalam suatu negara yang seluas dan sebesar Indonesia, maka masalah keanekaragaman antar daerah, baik dalam bentuk perbedaan tingkat perkembangan ekonomi, perbedaan suku bangsa, bahasa, adat istiadat, sumber daya alam, dan sebagainya merupakan masalah-masalah yang harus selalu diperhatikan dalam menjaga dan meningkatkan kesatuan bangsa. Hal ini dikarenakan perbedaan-perbedaan tersebut menjadi sumber pertentangan dan pertikaian antar suku bangsa, antar agama, antar bahasa, dan dapat menjadi penyebab dari pecahnya suatu bangsa atau negara.

Desentralisasi dan otonomi daerah dapat mengatasi kemungkinan timbulnya pertentangan akibat perbedaan-perbedaan tersebut. Apabila setiap komunitas di mana suatu suku bangsa, atau bahasa, atau agama, merupakan yang minoritas, dan kepada komunitas tersebut diberikan unit pemerintahan "Daerah" yang terpisah dari lainnya, maka komunitas tersebut akan merasa mempunyai identitasnya sendiri, sehingga tidak akan merasa perlu untuk memisahkan diri dari negara induknya untuk mendirikan negara sendiri.

Penerapan desentralisasi dan otonomi daerah bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi ekonomi yang ada sehingga dapat memacu peningkatan aktivitas perekonomian di daerah yang pada akhirnya meningkatkan perekonomian nasional. Penerapan otonomi daerah yang telah digariskan dalam UU No. 33/2004, mensyaratkan adanya suatu perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam negara kesatuan yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta pemerataan antar daerah secara proporsional, adil, demokratis dan transparan.

Desentralisasi fiskal tidak akan berguna jika tidak diikuti dengan kemampuan finansial yang cukup memadai oleh pemerintah daerah. Adapun sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk pendanaan pemerintahan daerah menurut UU No. 33/2004 dalam pelaksanaan desentralisasi meliputi: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus

(DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Dalam UU. No 33/2004 juga memberikan kewenangan bagi daerah untuk meningkatkan kemampuan pendapatannya, yaitu dengan meluaskan jangkauan dari bagian pajak dan bagi hasil sumber daya alam dengan pemerintah pusat.

Fenomena yang muncul pada pelaksanaan otonomi daerah adalah ketergantungan pemerintah daerah yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Ketergantungan ini terlihat jelas dari aspek keuangan, pemerintah daerah kehilangan keleluasaan bertindak untuk mengambil keputusan-keputusan yang penting, dan adanya campur tangan pemerintah pusat yang tinggi terhadap Pemerintah daerah. Pembangunan daerah terutama fisik memang cukup pesat, tetapi tingkat ketergantungan fiskal antara daerah terhadap pusat sebagai akibat dari pembangunan juga semakin besar. Ketergantungan terlihat dari relatif rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dominannya transfer dari pusat. Adalah ironis, Kendati pelaksanaan otonomi menitik beratkan pada kabupaten /kota sebagai ujung tombak, namun justru kabupaten/kota-lah yang mengalami tingkat ketergantungan yang lebih tinggi dibanding propinsi (Mudrajad, 2004).

Dalam masalah keuangan daerah, perimbangan pembiayaan pemerintah pusat dan daerah dengan pendapatan yang secara leluasa digali sendiri untuk mencukupi kebutuhan sendiri masih mempunyai kelemahan sehingga keterbatasan dalam potensi penerimaan daerah tersebut bisa menjadikan ketergantungan terhadap transfer pusat. Pemerintah Daerah selama ini memiliki keterbatasan pembiayaan dari potensi sendiri (PAD). Selama ini komponen pembiayaan terbesar berasal dari dana transfer dari pusat yaitu Dana Alokasi Umum dan hanya sebagian kecil dari PAD, potensi pembiayaan lain yang belum dikelola yaitu dari pinjaman daerah (Santoso, 2003).

Idealnya semua pengeluaran pemerintah daerah dapat dicukupi dengan menggunakan PAD-nya, sehingga daerah menjadi benar-benar otonom. Selama tahun 2001 – 2003 peranan PAD terhadap pengeluaran rutin dan total pengeluaran APBD semakin menurun. Menurunnya peranan PAD terhadap

pengeluaran rutin dan pengeluaran total dalam APBD mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan peranan mekanisme transfer dari pemerintah pusat melalui dana perimbangan. Tujuan utama pemberian dana perimbangan dalam kerangka otonomi daerah untuk pemerataan kemampuan fiskal pada tiap daerah (*equalizing transfer*). Penggunaan DAU, DBHP dan DBH SDA (*block grants*) diserahkan pada kebijakan masing-masing daerah. Pada awal penerapannya DAU banyak dimanfaatkan untuk membiayai pengeluaran rutin terutama untuk belanja pegawai sebagai dampak pengalihan status pegawai pusat menjadi pegawai pemda (Waluyo, 2007). Sedangkan penggunaan DAK (*specific grants*) telah ditentukan oleh pemerintah pusat dengan kewajiban daerah penerima harus menyediakan 10% dana pendamping.

Kebijakan Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai tujuan utama untuk memperkuat kondisi fiskal daerah dan mengurangi ketimpangan antar daerah (*horizontal imbalance*). Melalui kebijakan bagi hasil SDA diharapkan masyarakat daerah dapat merasakan hasil dari sumber daya alam yang dimilikinya (Waluyo, 2007). Walaupun Indonesia terkenal sebagai daerah yang kaya akan SDA tetapi persebarannya tidak merata di seluruh daerah.

Dana Alokasi Khusus (DAK) bertujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Di samping itu tujuan pemberian DAK adalah untuk meningkatkan penyediaan maka peranan DAK sangat penting untuk mempercepat konvergensi antar daerah, karena dana diberikan sesuai dengan prioritas nasional, misalnya DAK untuk bantuan keluarga miskin. Dalam jangka panjang dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan yang merupakan bagian dari anggaran kementerian negara/lembaga yang digunakan untuk melaksanakan urusan yang menurut peraturan perundang-undangan menjadi urusan daerah akan dialihkan menjadi DAK (Waluyo, 2007).

Hakekat otonomi adalah adanya kewenangan daerah, bukan pendelegasian (Adi, 2005). Daerah tidak lagi sekedar menjalankan instruksi pemerintah pusat, tetapi benar-benar mempunyai keleluasaan untuk meningkatkan kreatifitas dalam mengembangkan potensi yang selama era sentralisasi bisa dikatakan terpasung (Adi, 2002). Akan tetapi krisis ekonomi moneter yang berkepanjangan dari pertengahan tahun 1997 mengakibatkan

kebijakan ini memunculkan kesiapan (fiskal) daerah yang berbeda satu dengan yang lain. Kebijakan ini justru dilakukan pada saat terjadi disparitas pertumbuhan (ekonomi) yang tinggi.

Sebagai solusi, pemerintah menetapkan alokasi transfer dana (DAU) yang berbeda. Daerah yang mempunyai kapasitas fiskal tinggi akan mendapat pasokan dana yang lebih kecil daripada daerah yang kapasitas fiskalnya rendah. Pemberian transfer ini bertujuan untuk menjamin tercapainya *standar pelayanan publik* dan *mengurangi kesenjangan horizontal* (antar daerah) dan *kesenjangan vertikal* (pusat- daerah) (Adi, 2005). Namun demikian, meskipun konvergensi antar daerah mampu teratasi, kinerja pemerintah daerah bisa jadi berbeda. Daerah yang mempunyai tingkat pertumbuhan lebih baik relatif mempunyai tingkat kesiapan yang lebih baik pula untuk menghadapi desentralisasi.

Bohte dan Meier (2000) melakukan komparasi pertumbuhan ekonomi pada pemerintahan yang tersentralisasi dengan pemerintahan terdesentralisasi. Peneliti menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan lebih tinggi ternyata terjadi pada pemerintahan yang terdesentralisasi. Karena pentingnya masalah desentralisasi fiskal dalam pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi maka penulis mengambil judul penelitian: "Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Pada Periode 2000-2008"

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan penelitian eksplanatif dan analisis data sekunder. Penelitian ini dilakukan di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan mengambil sampel wilayah yang terdiri dari empat kabupaten dan satu kota, yakni Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari Buku Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka, Kabupaten/ Kota dalam Angka, Produk Domestik Regional Bruto menurut Kabupaten/ Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan disamping juga data yang berasal dari sumber-sumber lain yang relevan dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan metode data panel yaitu gabungan antara data *cross section* dan *time series*, dimana unit *cross section* yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Pada dasarnya ada tiga teknik untuk mengestimasi data panel (Gujarati, 2003), yaitu: pendekatan PLS biasa (*Pooled Least Square*), pendekatan efek tetap (*Fixed Effect Model*), dan pendekatan efek acak (*Random Effect Model*). Pada dasarnya penggunaan metode data panel memiliki beberapa keunggulan. *Pertama*, panel data mampu memperhitungkan heterogenitas individu secara eksplisit dengan mengizinkan variabel spesifik individu. Kemampuan mengontrol heterogenitas individu ini, pada gilirannya menjadikan data panel dapat digunakan untuk menguji dan membangun model perilaku yang lebih kompleks. *Kedua*, jika efek spesifik signifikan berkorelasi dengan variabel penjelas lainnya, penggunaan panel data akan mengurangi masalah *omitted variables* secara substansial. *Ketiga*, data panel mendasarkan diri pada observasi *cross section* yang berulang-ulang (*time series*), sehingga metode data panel cocok digunakan sebagai *study of dynamic adjustment*. *Keempat*, tingginya jumlah observasi memiliki implikasi pada data yang lebih informatif, lebih variatif, kolinieritas antar variabel yang semakin berkurang, dan peningkatan derajat kebebasan (*degree of freedom*), sehingga dapat diperoleh estimasi yang lebih efisien. Keunggulan-keunggulan tersebut diatas memiliki implikasi pada tidak diperlukan pengujian asumsi klasik dalam model data panel. (Maddala, 1998; Pindyck dan Rubinfeld, 1991; dan Gujarati, 2003).

a. PLS dengan FEM

Pendekatan Kuadrat Terkecil (*Pooled least Squares*) dengan Pendekatan Efek Tetap (*Fixed Effect Model*) adalah *restricted model* dimana ia menerapkan *intercept* yang sama untuk individu. Padahal asumsi bahwa setiap unit *cross section* memiliki perilaku yang sama cenderung tidak realistis mengingat dimungkinkan saja setiap unit tersebut memiliki perilaku yang berbeda. Untuk mengujinya dapat digunakan *restricted F-test* dengan hipotesis sebagai berikut:

$H_0$  : Model PLS (*Restricted*)

$H_a$  : *Fixed Effect Model (Unrestricted)*

Dimana *restricted F-test* dirumuskan sebagai berikut:

$$F = \frac{(R^2_{UR} - R^2_R) / m}{(1 - R^2_{UR}) / df}$$

Dimana:

$R^2_{UR}$  = unrestricted  $R^2$  ;  $m$  = *df for numerator* (N-1)

$R^2_R$  = restricted  $R^2$  ;  $df$  = *df for denominator* (NT-N-k)

N = Jumlah data cross section

T = Jumlah data time series

K = Jumlah Koefisien Variabel

#### b. FEM dengan REM

Ada beberapa pertimbangan teknis-empiris yang dapat digunakan sebagai panduan untuk memilih antara *fixed effect model* atau *random effect model* (ToT untuk Pengajar Ekonomi FEUI, 2006) yaitu:

- 1) Bila T (jumlah unit *time series*) besar sedangkan N (jumlah unit *cross section*) kecil, maka hasil FEM dan REM tidak jauh berbeda. Dalam hal ini pilihan umumnya akan didasarkan pada kenyamanan perhitungan, yaitu FEM.
- 2) Bila N besar dan T kecil, maka hasil estimasi kedua pendekatan dapat berbeda secara signifikan. Jadi, apabila kita meyakini bahwa unit *cross section* yang kita pilih dalam penelitian diambil secara acak (*random*) maka REM harus digunakan. Sebaliknya, apabila kita meyakini bahwa unit *cross section* yang kita pilih dalam penelitian tidak diambil secara acak maka kita menggunakan FEM.
- 3) Apabila *cross-section error component* ( $\epsilon_i$ ) berkorelasi dengan variabel bebas X maka parameter yang diperoleh dengan REM akan bias sementara parameter yang diperoleh dengan FEM tidak bias.
- 4) Apabila N besar dan T kecil, dan apabila asumsi yang mendasari REM dapat terpenuhi, maka REM lebih efisien dibandingkan FEM.

Keputusan penggunaan FEM dan REM dapat pula ditentukan dengan menggunakan spesifikasi yang dikembangkan oleh Hausmann. Spesifikasi ini akan memberikan penilaian dengan menggunakan *Chi-square statistics* sehingga keputusan pemilihan model akan dapat ditentukan secara statistik.

Pengujian ini dilakukan dengan hipotesa sebagai berikut:

$H_0$ : *Random Effects Model*

$H_a$ : *Fixed Effect Model*

Setelah dilakukan pengujian ini, hasil dari Hausman test dibandingkan dengan *Chi-square statistics* dengan  $df=k$ , dimana  $k$  adalah jumlah koefisien variabel yang diestimasi. Jika hasil dari Hausman test signifikan, maka  $H_0$  ditolak, yang berarti FEM digunakan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Estimasi Model Data Panel

Pertama-tama dilakukan pengolahan data dengan metode pendekatan *Pooled Least Squares*, setelah itu dilakukan pengolahan data dengan metode pendekatan *Fixed Effect Model (FEM)* untuk dibandingkan dengan metode pendekatan *Pooled Least Square* pada uji *F-Restricted*. Dari hasil pengolahan program *E-Views 6.0* didapatkan hasil seperti tampilan sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Regresi Data Panel: PLS dan FEM**

	PLS	FEM
R-squared	0.761162	0.987063
Adjusted R-squared	0.737278	0.984188

*Sumber: Data diolah*

Untuk mengetahui model data panel yang akan digunakan, maka digunakan uji *F-restricted* dengan cara membandingkan F-statistik dan F-tabel. Sebelum membandingkan F-statistik dan F-tabel terlebih dahulu dibuat hipotesisnya. Adapun hipotesisnya adalah sebagai berikut:  $H_0$ : Model PLS (*Restricted*)  $H_1$ : Model FEM (*Unrestricted*).

Dari table di atas diperoleh nilai F-statistik adalah 157,151986, dengan nilai F-tabel pada  $df (4,36)$   $\alpha = 5\%$  adalah 2,63 sehingga nilai F statistik  $>$  F tabel, maka  $H_0$  ditolak, sehingga model data panel yang dapat digunakan adalah *Fixed Effect Model*. Setelah diketahui bahwa model yang digunakan adalah *Fixed Effect Model*, model data panel masih harus dibandingkan lagi antara *Fixed Effect* dengan *Random Effect*. Pendekatan *Random Effect* memiliki syarat bahwa *number of unit cross section > number of coefficient*. Tetapi pada penelitian kali ini, persamaan regresi tidak memenuhi syarat tersebut, dimana *number of unit cross section < number of coefficient* sehingga pendekatan

*Random Effect* tidak dapat dilakukan dan model panel tetap pada *Fixed Effect Model*.

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah variabel bebas (pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus) berpengaruh secara parsial terhadap variabel terikatnya (pertumbuhan ekonomi), yaitu dengan membandingkan masing-masing nilai t-statistik dari regresi dengan t-tabel dalam menolak atau menerima hipotesis. Pada tingkat kepercayaan  $\alpha = 5\%$ ,  $df = 36$ , maka diperoleh t-tabel 2,02.

Pada variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara individu berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dengan taraf keyakinan 5% atau nilai signifikan  $0,0377 < \alpha = 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hal ini berarti bahwa variabel PAD berpengaruh terhadap variabel pertumbuhan ekonomi. PAD merupakan sumber utama penerimaan suatu daerah. Dengan diberlakukannya kebijakan ekonomi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, maka setiap daerah akan berusaha untuk meningkatkan PAD-nya dengan berbagai macam cara. Maka dari itu, dalam penelitian ini PAD memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Variabel Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dengan taraf keyakinan 5% atau nilai signifikan  $0,0130 < \alpha = 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hal ini berarti bahwa variabel dana bagi hasil berpengaruh terhadap variabel pertumbuhan ekonomi. Dikarenakan bahwa DBH berpegang kepada indikator-indikator kemakmuran umum diketahui bahwa sebagian besar daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam kurang menikmati kemakmuran. Salah satu motivasi desentralisasi adalah upaya agar daerah mendapatkan bagian dari kekayaan alam yang mereka miliki, maka dari itu pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta selalu membagi rata DBH kesetiap kabupaten/ kota DIY.

Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dengan taraf keyakinan 5% atau nilai signifikan  $0,0003 < \alpha = 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hal ini berarti bahwa variabel dana alokasi umum berpengaruh terhadap variabel pertumbuhan ekonomi. Dikarenakan bahwa DAU yang dianggap sebagai modal bagi kepentingan pembangunan daerah akan mempercepat pertumbuhan

ekonomi. Karena dana alokasi umum adalah salah satu bentuk penerimaan daerah yang bersumber dari dana perimbangan. Alokasi DAU yang diberikan kepada daerah disesuaikan dengan kondisi dan potensi daerah tersebut agar tidak terjadi misalokasi. Dengan demikian DAU diberikan dengan menggunakan asas proporsi terbalik, dimana daerah miskin akan menerima DAU lebih besar dari pada daerah yang kaya.

Variabel Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dengan taraf keyakinan 5% atau nilai signifikan  $0,096 > \alpha = 0,05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap variabel pertumbuhan ekonomi. Dikarenakan bahwa DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membiayai kegiatan yang merupakan urusan daerah, di mana kegiatan khusus tersebut telah disesuaikan dengan fungsi yang telah ditetapkan oleh APBN, maka dari itu DAK tidak berpengaruh signifikan pada setiap kabupaten/ kota. Dan dalam pembagian DAK mempunyai tiga kriteria dalam pembagiannya.

Berdasarkan hasil empiris dapat dilihat bahwa model pertumbuhan ekonomi menunjukkan hasil F-statistik sebesar 343.3336 dan probabilitasnya adalah sebesar 0.000000 sehingga dapat dikatakan bahwa taraf keyakinan untuk pengujian F hingga 1%. Dengan demikian, nilai  $F_{\text{statistik}} > F_{\text{tabel}}$  yang berarti  $H_0$  ditolak. Artinya yaitu secara bersama-sama variabel bebas dalam model mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel tergantung (pertumbuhan ekonomi) atau variabel PAD (X1), variabel DBH (X2), variabel DAU (X3) dan variabel DAK (X4) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Pertumbuhan ekonomi (Y).

Variabel pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan bahwa PAD merupakan peningkatan yang dianggap sebagai modal, secara akumulasi akan lebih banyak mempercepat pertumbuhan ekonomi dan PAD sebagai penerimaan dari usaha untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah, oleh karena itu peningkatan pendapatan asli daerah selalu diupayakan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Variabel dana bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini dikarenakan bahwa DBH

berpegang kepada indikator-indikator kemakmuran umum diketahui bahwa sebagian besar daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam kurang menikmati kemakmuran. Salah satu motivasi desentralisasi adalah upaya agar daerah mendapatkan bagian dari kekayaan alam yang mereka miliki, maka dari itu pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta selalu membagi rata DBH kesetiap kabupaten/ kota DIY.

Variabel dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini dikarenakan bahwa DAU yang dianggap sebagai modal bagi kepentingan pembangunan daerah akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Karena dana alokasi umum adalah salah satu bentuk penerimaan daerah yang bersumber dari dana perimbangan. Alokasi DAU yang diberikan kepada daerah disesuaikan dengan kondisi dan potensi daerah tersebut agar tidak terjadi misalokasi. Dengan demikian DAU diberikan dengan menggunakan asas proporsi terbalik, dimana daerah miskin akan menerima DAU lebih besar dari pada daerah yang kaya. Semakin kaya satu daerah maka semakin kecil DAU yang dialokasikan. bagian dari dana perimbangan untuk mengatasi ketimpangan vertikal yang dilakukan melalui pembagian hasil antara pemerintah pusat dan daerah penghasil, dari sebagian penerimaan perpajakan (nasional) dan penerimaan sumber daya alam. Filosofi yang menjadi arah pelaksanaan dana bagi hasil adalah pemerintah pusat, propinsi, dan kabupaten/kota telah memiliki bagian yang telah ditentukan oleh perundang-undangan dari sumberdaya alam (hutan, pertambangan, perikanan, minyak dan gas bumi).

Variabel dana alokasi khusus berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini dikarenakan bahwa DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membiayai kegiatan yang merupakan urusan daerah, di mana kegiatan khusus tersebut telah disesuaikan dengan fungsi yang telah ditetapkan oleh APBN, maka dari itu DAK tidak berpengaruh signifikan pada setiap kabupaten/ kota. Dan dalam pembagian DAK mempunyai tiga kriteria dalam pembagiannya. *Pertama*, kriteria umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keuangan daerah dalam APBD. *Kedua*, kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah. Dan

*ketiga*, kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kementerian negara/departemen teknis. Jadi cukup sulit untuk setiap daerah mendapat DAK.

Desentralisasi merupakan bagian dari strategi setiap institusi yang berkehendak untuk menjadi kompetitif dalam persaingan global. Dalam praktik, desentralisasi dan otonomi bersifat tumpang tindih. Namun, dalam makna keduanya memiliki perbedaan. Desentralisasi merupakan sistem pengelolaan yang berlebihan dengan sentralisasi. Jika sentralisasi adalah pemusatan pengelolaan, maka desentralisasi adalah pembagian dan pelimpahan.

Menurut Prawirosetoto (2002), Desentralisasi fiskal adalah pendelegasian tanggung jawab dan pembagian kekuasaan dan kewenangan untuk pengambilan keputusan di bidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan (*tax assignment*) maupun aspek pengeluaran (*expenditure assignment*). Desentralisasi fiskal ini dikaitkan dengan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam penyediaan barang dan jasa publik (*public goods/public service*).

Untuk mewujudkan peningkatan pendapatan daerah ada beberapa yang harus dilakukan antara lain: memperbaharui data obyek pajak, peningkatan pelayanan dan perbaikan administrasi perpajakan, peningkatan pengawasan terhadap wajib pajak, peningkatan pengawasan internal terhadap petugas pajak, dan mencari sumber-sumber pendapatan lain sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kaitannya dengan pembiayaan, akan terus diupayakan peningkatan penyertaan modal pada beberapa badan usaha milik daerah agar dapat menghasilkan peningkatan PAD.

## **SIMPULAN**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan bahwa PAD merupakan peningkatan yang dianggap sebagai modal, secara akumulasi akan lebih banyak mempercepat pertumbuhan ekonomi dan PAD sebagai penerimaan dari usaha untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah, oleh karena itu peningkatan pendapatan asli daerah selalu diupayakan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dana Hasil Bagi (DBH) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan bahwa DBH berpegang kepada indikator-indikator kemakmuran umum diketahui bahwa sebagian besar daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam kurang menikmati kemakmuran. Salah satu motivasi desentralisasi adalah upaya agar daerah mendapatkan bagian dari kekayaan alam yang mereka miliki, maka dari itu pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta selalu membagi rata DBH kesetiap kabupaten/ kota DIY.

Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan bahwa DAU yang dianggap sebagai modal bagi kepentingan pembangunan daerah akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Karena dana alokasi umum adalah salah satu bentuk penerimaan daerah yang bersumber dari dana perimbangan. Alokasi DAU yang diberikan kepada daerah disesuaikan dengan kondisi dan potensi daerah tersebut agar tidak terjadi misalokasi. Dengan demikian DAU diberikan dengan menggunakan asas proporsi terbalik, dimana daerah miskin akan menerima DAU lebih besar dari pada daerah yang kaya. Semakin kaya satu daerah maka semakin kecil DAU yang dialokasikan. bagian dari dana perimbangan untuk mengatasi ketimpangan vertikal yang dilakukan melalui pembagian hasil antara pemerintah pusat dan daerah penghasil, dari sebagian penerimaan perpajakan (nasional) dan penerimaan sumber daya alam.

Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan bahwa DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membiayai kegiatan yang merupakan urusan daerah, di mana kegiatan khusus tersebut telah disesuaikan dengan fungsi yang telah ditetapkan oleh APBN, maka dari itu DAK tidak berpengaruh signifikan pada setiap kabupaten/ kota.

## **PUSTAKA ACUAN**

Adi, Priyo Hari. 2005. *Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali)*. Skripsi Tidak Dipublikasikan. Universitas Kristen Satya Wacana.

- Boediono, 1999. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, Yogyakarta: BPFE Universitas Gadjah Mada.
- Bohte, John dan Kenneth J Meier. 2000. *The Marble Cake : Introducing Federalism to The Government Growth Equation*. Publius. Summer. Hal : 35 – 99.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi & Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Lutfi, Achmad. 2001. *Pemanfaatan Kebijakan Desentralisasi Fiskal Berdasarkan UU No. 34/2000 Oleh Pemda Untuk Menarik Pajak Daerah dan Retribusi Daerah : Studi di Kota Bogor*.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Pujiati, Amin. 2007. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Karesidenan Semarang Era Desentralisasi Fiskal*. Skripsi Tidak Dipublikasikan. Universitas Negeri Semarang.
- Santoso, Rokhedi P. 2003. Analisis Pinjaman Sebagai Potensi Pembiayaan Pembangunan Daerah: Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume VIII, No. 2, 147-158.
- Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: ANDI,.
- Sutarno dan Kuncoro, Mudrajad. 2003. *"Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Kecamatan di Kabupaten Banyumas, 1993-2000*. Universitas Gadjah Mada.
- Toddaro, Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Widiyarta, Agus. 2003. *Desentralisasi Fiskal Dalam Pendanaan Pembangunan Daerah*. Vol. 2, No. 2. Januari 2003.
- Winarno, Wahyu Wing. 2008. *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews Edisi Kedua*. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.